

Irjen Teddy Minahasa Baru akan Jalani Sidang Etik Setelah Kasus Narkoba Inkrah

JAKARTA (IM) – Eks Kapolda Sumatera Barat (Sumbar), Irjen Teddy Minahasa baru akan menjalani sidang etik setelah putusan pidana perkara narkoba yang menjatuhkannya memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Kalau misalnya dia belum inkrah dan belum bisa mengikuti persidangan di Polri pasti kita akan menunggu,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah, saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (12/5).

Meski demikian, pihak Propam Polri tetap menyiapkan proses sidang etik terhadap Teddy sambil menunggu upaya hukum yang masih berjalan.

“Itu harus fokus dulu karena prinsip persidangan kan berjalan secara cepat dan sederhana, karena proses persidangan di pengadilan masih berjalan. Jadi kita tetap paralel, hal-hal apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan,” katanya.

Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), menjatuhkan vonis seumur hidup penjara kepada Teddy.

Teddy dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram.

Dia pun dinilai terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam menjalankan tindak pidana itu, dia turut melibatkan AKBP Dody Prawiranegara, Linda Pujiastuti, Kumpul Kasranto, Aiptu Janto Parluhutan Situmorang, Muhammad Nasir, dan Syamsul Maarif. • lus

FOTO: ANTARA



PENETAPAN TERSANGKA KASUS BUS MASUK JURANG DI TEGAL

Kapolres Tegal AKBP Mochammad Sajarod Zakun (tengah) didampingi Senior Investigator Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) Ahmad Wildan (kiri) dan Agen Pemegang Merek (APM) Sugiman (kanan) memberikan keterangan terkait kecelakaan bus masuk jurang saat konferensi pers di Polres Tegal, Jawa Tengah, Jumat (12/5). Polres Tegal menetapkan sopir bus Romyani (56) dan kernet Andri Yulianto (44) sebagai tersangka kecelakaan tunggal bus masuk jurang di obyek wisata Guci yang mengakibatkan dua penumpang meninggal dan 35 luka-luka.

Kapolda Metro Jaya Bakal Buka *Hotline* Agar Masyarakat Bisa Langsung Mengadu

Irjen Karyoto mengatakan, masyarakat dapat melaporkan langsung keluhannya ke Polda Metro Jaya melalui WhatsApp yang sudah disediakan.

JAKARTA (IM) - Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, akan membuka *hotline* agar masyarakat bisa langsung

melakukan pengaduan awal atau yang ingin menanyakan tindak lanjut perkara yang dihadapi.

“Kami nanti akan membuka peluang kepada seluruh masyarakat yang pernah berperkara di sini yang masih ada keluhan akan kami membuat semacam *hotline*,” kata Karyoto dikutip Jumat (12/5).

Dengan adanya *hotline* tersebut diharapkan akan memudahkan masyarakat membuat pengaduan tentang masalah hukum yang dialaminya. Pihak kepolisian, lanjut Karyoto, akan menindaklanjuti dan merespons cepat setiap keluhan yang ada.

Lantas, Karyoto meminta para penyidik untuk bersikap profesional dalam bertugas. Mereka harus berpedoman pada kode etik Polri dan aturan yang ada saat melakukan penyelidikan ataupun penyidikan suatu kasus.

“Kemudian kami juga menginginkan kepada seluruh penyidik saya, harus bisa bertindak betul-betul profesional. Artinya dari sikap, perilaku, dan dalam melayani masyarakat betul-betul sesuai dengan aturan. Disesuaikan dengan kode etik Polri maupun dengan hukum acara yang dijadikan pedoman dalam melakukan penyidikan,” jelasnya.

Tak Bisa *Restorative Justice*

Irjen Karyoto sebelumnya bersama semua penyidik dari Direktorat Polda Metro Jaya dan Polres, membahas proses penegakan hukum yang maksimal. Dalam pertemuan tersebut, Karyoto menegaskan bahwa kasus narkoba hingga korupsi tidak bisa diselesaikan dengan *restorative justice*.

“In meminta proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara profesional dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Artinya, jika tidak memungkinkan berlanjutan, kasus harus diusut sampai tuntas.

“Sebuah perkara kalau memang harus berhenti harus kita beranikan berhenti, kalau harus lanjut kita juga harus lanjut. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” kata Karyoto kepada wartawan, Kamis (11/5).

Jika tidak bisa diselesaikan dengan *restorative justice* pihaknya akan mengusut perkara yang ada hingga tuntas.

“Produknya (*restorative justice*) semacam surat pernyataan bahwa mereka telah menyelesaikan permasalahan. Seperti bagaimana bahwa upaya penegakan hukum adalah upaya terakhir,” katanya. • lus

Kapolres Bogor Tegaskan akan Tindak Tegas Penambang Emas Ilegal di Tanjungsari Bogor

BOGOR (IM) – Polisi membantah longsor yang terjadi di kawasan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), disebabkan karena adanya aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Gunung Sanggabuana. Sebab lokasi longsor dengan tambang emas ilegal itu cukup jauh.

“Longsor tersebut diketahui adanya faktor alam dengan pergeseran tanah dan curah hujan yang sangat tinggi di wilayah tersebut, adalah jauh dari lokasi yang selama ini disebutkan sebagai tambang galian ilegal atau liar,” kata Kapolsek Tanjungsari, Iptu Rustami, dalam keterangannya, Jumat (12/5).

“Jarak antara longsor dengan adanya galian tambang emas ilegal atau liar tersebut jaraknya bisa diperkirakan memakan waktu perjalanan sekitar 2 jam lebih dan harus ditempuh melalui jalan darat dengan berjalan kaki dan tidak mudah untuk bisa cepat sampai ke lokasi galian liar tersebut,” katanya.

Meski demikian, Rustami tak membantah soal adanya aktivitas tambang emas ilegal di Gunung Sanggabuana. Namun, pihaknya telah beberapa kali menertibkan praktik ilegal tersebut.

“Sudah kita tertibkan, dua kali malah. Memang saat kita tertibkan tidak

ditemukan pelaku di lokasi. Namun beberapa beban dalam karung dan saung mereka kita temukan. Langsung kita tertibkan dengan melakukan tindakan bersama instansi terkait dengan pembongkaran, merobohkan, serta dihancurkan,” tuturnya.

Sebelumnya beredar isu bahwa aktivitas tambang emas liar di lokasi tersebut dilakukan karena sudah ada koordinasi. Disebut bahwa koordinator penambang ilegal disebut membayar Rp1 miliar kepada aparat terkait.

“Saya bersama aparat terkait yaitu Camat Tanjungsari, Koramil, dan pihak Perhutani mendengar akan adanya informasi tersebut akan siap mengadakan pertemuan dengan melakukan mediasi dan konfrontasi dari pemberitaan tersebut, bersama LSM dan pihak penambang galian ilegal tersebut. Karena tuduhan yang ada suatu tindakan keji dan tidak mendasar, dan saya akan langsung mengajak semua elemen untuk bersama-sama menertibkan para pelaku penambang emas ilegal itu,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan akan menindak tegas penambang emas ilegal tanpa pandang bulu. Dia sendiri yang akan terjun langsung.

“Dengan adanya berita

fitnah yang dibuat oleh para pelaku tersebut terkait uang koordinasi hanya sebagai upaya menjatuhkan penegak hukum dan akan kami tindak tegas,” jelas Iman.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Sanggabuana Conservation Foundation Solihin Fuadi mengatakan, sejak Maret 2023 lalu, pihaknya telah mengimbau agar para penambang liar di kaki Gunung Sanggabuana untuk berhenti menambang emas secara ilegal di hutan.

“Saya sudah 4 kali mengimbau para penambang ilegal atau Gurandil, untuk berhenti menambang emas di sana, karena dampak yang ditimbulkan yah seperti ini,” ujar Solihin saat ditemui di Tegal, di Kawasan Karangpawitan Kabupaten Karawang, Selasa (9/5).

Longsor tersebut, kata Solihin merupakan imbas dari pengikisan tanah, serta penambangan hutan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan emas ilegal.

“Material longsor itu berasal dari bekas tambang emas ilegal, mereka menambang dari bawah bagian terdepan, kemudian merangsek ke bagian dalam hutan. Bekas tambang itu kan menimbulkan kikisan tanah yang mereka gali serta penambangan pohon yang dilakukan para Gurandil,” paparnya. • lus



RENCANA PEMASANGAN ETLE DI JALAN LAYANG CASABLANCA

Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca, Jakarta, Jumat (12/5). Polda Metro Jaya berencana memasang kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di JLNT Casablanca guna menindak para pengendara sepeda motor yang melintas di jalan tersebut.



IMBAUAN TERTIB LALU LINTAS

Polri Satuan Lalu Lintas Jakarta Timur memberikan imbauan tentang Tertib Lalu Lintas dan Penyuluhan tentang Tilang Elektronik (ETLE) kepada UPS Badan Air Jakarta Timur di BKT Duren Sawit Jakarta Timur, Jumat (11/5). TMC

Tersangka Pembacok Murid SMK di Bogor Ditangkap di Yogya Setelah 2 Bulan Buron

BOGOR (IM) - Pelarian ASR alias Tukul (17), tersangka pembacok siswa SMK di Kota Bogor, berakhir sudah. Setelah dua bulan menjadi buronan, Polisi menangkapnya di daerah Yogyakarta, Kamis (11/5).

Tukul langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bogor Kota. Sekitar pukul 20.00 WIB, Tukul bersama anggota Satsreskrim Polres Bogor Kota tiba di Mapolresta. Dengan wajah tertunduk, Tukul digiring menuju ruangan untuk menjalani pemeriksaan.

Kapolres Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, Tukul merupakan pelaku utama atau eksekutor yang membacok korban hingga Arya Saputra, siswa kelas X SMK Bina Warga, tewas. Kejadian pada Maret 2023 di Simpang Pomad.

“Kami sudah menangkap tersangka DPO pembacokan inisial ASR alias Tukul di Yogyakarta,” kata Bismo, Kamis (11/5) malam.

Bismo menyebut, selama dalam pelarian Tukul kerap berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota lain. Tujuannya agar keberadaannya sulit ditemukan polisi. Saat ini tersangka Tukul masih diminta keterangan oleh penyidik.

“Untuk press release resminya kita atur waktu berikutnya,” tutur Bismo.

Residivis

Berdasarkan catatan kepolisian, ternyata Tukul memiliki rekam jejak kriminal. Sebelumnya Tukul ditahan karena membacok orang juga. Saat masih berstatus pelajar, ternyata Tukul pernah menjambret.

“Jadi dia ini merupakan residivis jambret di wilayah Kabupaten

Bogor,” ungkap Bismo.

Selain Tukul, sebelumnya polisi telah menangkap dua orang tersangka pembacokan Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga. Keduanya menangkannya di daerah Yogyakarta, Kamis (11/5).

MA ditangkap di wilayah Lebak, Provinsi Banten, sedangkan SA ditangkap di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tersangka memiliki peran masing-masing saat menghabsi korban.

MA merupakan pemilik senjata tajam gombang dan pengendara sepeda motor saat menyerang korban. Sementara itu, SA berperan menghilangkan atau membuang barang bukti senjata gombang.

Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Maret lalu, polisi menyampaikan, motif pembacokan dilatarbelakangi permasalahan lama antara sekolah korban dengan sekolah pelaku. Konflik itu memuncak setelah para pelaku menerima sebuah pesan berisi tantangan yang dikirim melalui Instagram.

Para pelaku kemudian terprovokasi, lalu mendatangi sekolah korban untuk mencari pengirim pesan tersebut. Karena tak berhasil menemukan orang yang dicari, para pelaku melampiaskannya dengan melakukan pembacokan secara acak. Mereka membacok korban yang saat itu sedang menyeberang.

“Awalnya ada tantangan via Instagram yang dikirim oleh A dari sekolah yang sama dengan korban. Pelaku terprovokasi lalu membalas tantangan itu dengan mendatangi sekolah tersebut,” ungkap Bismo, saat itu. • lus

FOTO: ANTARA

Dalam penelusuran terbaru, nama Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono juga tercatat belum lapor LHKPN. • lus

Masih Ada 700 Anggota Polri yang Belum Serahkan LHKPN

JAKARTA (IM) - Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Ahmad Dofiri bakal memimpin penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 700 anggota Polri yang wajib lapor di lingkungan korps Bhangkara.

Demikian dikatakan Juru Bicara Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati Kuding, usai melakukan pertemuan dengan Irwasum Polri.

“Irwasum akan memimpin dan mengoordinasikan penyampaian LHKPN dari sekitar 700 wajib lapor di lingkungan Polri yang belum menyerahkan LHKPN,” kata Ipi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/5).

Ipi mengatakan bahwa Kedepitan Pencegahan dan Monitoring dan Irwasum Polri telah bersepakat bahwa pelaporan 700 LHKPN itu akan diselesaikan dalam waktu satu bulan. Direktorat Pusat Pelaporan (PP) LHKPN pun menyatakan siap memberi asistensi dan mendampingi proses pelaporan kekayaan tersebut.

“Demi mendukung komitmen Polri mewujudkan 100 persen kepatuhan lapor di lingkungan Polri,” ujar Ipi.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah jenderal di lingkungan kepolisian tercatat belum melaporkan LHKPN ke KPK. Data tersebut merujuk pada penelusuran dari situs resmi KPK pada Selasa (2/5) lalu.

Jenderal tersebut antara lain eks Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Komjen Ahmad Dofiri. Saat ini, ia menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Kemudian, Komandan Korps Brigade Mobil (Brimob) Komjen Anang Revandoko juga belum lapor LHKPN dan eks Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang telah diangkat menjadi Kabaharkam Polri.

Selanjutnya, ada Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andianto dan mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Fadil Imran yang saat ini menjabat Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam). Lalu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Andi Rian Ryacudu Djajadi.

Dalam penelusuran terbaru, nama Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono juga tercatat belum lapor LHKPN. • lus